

# PRAKTIK TERKINI DAN TANTANGAN PENGAUDITAN NILAI WAJAR

Bellina G. Sembiring

*Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia*

e-mail: bellinags@gmail.com

## Abstrak

**Tujuan** --- Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyelidiki penggunaan pendekatan substantif, penggunaan pakar, dan tantangan yang dihadapi oleh auditor saat mengaudit nilai wajar.

**Desain/Metodologi/Pendekatan** --- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara semiterstruktur.

**Temuan** --- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan substantif yang menjadi preferensi utama auditor dalam mengaudit instrumen keuangan ialah menguji asumsi manajemen dan *me-review* peristiwa kemudian, sedangkan untuk aset nonkeuangan ialah menguji asumsi manajemen. Pendekatan substantif yang menjadi preferensi terakhir auditor ialah mengembangkan estimasi sendiri (*independen*), baik untuk instrumen keuangan maupun aset nonkeuangan. Mayoritas responden menggunakan tenaga penilai (*appraiser*) eksternal, baik untuk instrumen keuangan maupun nonkeuangan. Mayoritas responden setuju bahwa sebelum krisis ekonomi tahun 2008 penggunaan penyedia jasa penentuan harga (*pricing*) merupakan area audit dengan risiko yang relatif rendah, tetapi setelah tahun 2008, penggunaan penyedia jasa *pricing* merupakan area audit dengan risiko yang relatif lebih tinggi. Tiga tantangan yang paling banyak ditemui responden saat mengaudit nilai wajar ialah ketepatan asumsi manajemen, ketepatan model/metode manajemen, dan ketepatan alasan yang digunakan manajemen untuk mendapatkan nilai wajar.

**Batasan/Implikasi** --- Keterbatasan penelitian ini salah satunya ialah mayoritas responden merupakan auditor junior dan senior yang hanya punya akses terbatas atau sebagian terhadap keseluruhan tahapan pengauditan estimasi nilai wajar. Penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan, praktis, dan akademis terkait dengan pengauditan nilai wajar.

**Originalitas/Nilai** --- Nilai wajar semakin lazim ditemui dalam laporan keuangan. Mengingat relevansinya, penelitian dengan topik ini menjadi penting. Namun, penelitian yang berfokus pada proses pengauditan nilai wajar masih terbatas dan belum ditemukan di Indonesia. Penelitian ini bermaksud memperluas penelitian Glover dkk. (2017) tentang praktik dan tantangan pengauditan nilai wajar, namun pada konteks yang berbeda, yaitu di Indonesia.

**Kata kunci** : pengauditan nilai wajar, estimasi akuntansi, tenaga penilai, survei

## 1. Pendahuluan

Pengukuran nilai wajar telah semakin lazim digunakan dalam pelaporan keuangan dan semakin relevan bagi pengguna laporan keuangan. Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) yang diterbitkan oleh *The International Accounting Standards Board (IASB)* semakin mengukuhkan penggunaan nilai wajar daripada nilai historis.

Meskipun berguna bagi partisipasi pasar, pengukuran nilai wajar seringkali bersifat subjektif dan sulit diamati karena nilai tersebut merupakan estimasi nilai pasar suatu objek. Manajemen perlu menggunakan pertimbangan yang hati-hati agar bisa menyusun estimasi nilai wajar yang andal dan yang bisa menggambarkan nilai sesungguhnya dari suatu objek. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada manajemen yang tidak jujur dan memanipulasi laporan keuangan melalui penyusunan estimasi yang tidak benar demi mencapai tujuan tertentu. Hal ini tentu akan merugikan pengguna laporan keuangan.

Peran auditor sebagai pemberi asurans pada pengguna laporan keuangan atau pasar modal sangat dibutuhkan dalam memverifikasi nilai wajar tersebut. Namun, pengauditan nilai wajar merupakan tugas yang menantang karena melibatkan perkiraan subjektif sehingga memiliki ketidakpastian yang tinggi (Christensen dkk. 2012). Berbeda dengan akun berbasis kos historis yang mengharuskan auditor untuk memverifikasi keakuratan angkanya, auditor harus mengevaluasi kewajaran estimasi yang dibuat manajemen saat mengaudit nilai wajar. Selain itu, auditor

bisa saja tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk menilai kewajaran estimasi yang dibuat manajemen pada kondisi tertentu (Smith-Lacroix dkk. 2012), sehingga mereka menggunakan pakar, misalnya tenaga penilai (*appraiser*), untuk mengevaluasi model ekonomi dan keuangan yang rumit (Martin dkk. 2006).

Mengingat relevansinya, penelitian dalam bidang pengauditan nilai wajar menjadi penting. Penelitian yang berfokus pada proses pengauditan nilai wajar itu sendiri masih terbatas. Di Amerika Serikat, Glover dkk. (2017) telah melakukan penelitian terhadap auditor yang berpraktik di tiga kantor akuntan publik (KAP) *Big Four* dan dua KAP besar *non-Big Four* terkait pendekatan uji substantif, penggunaan pakar, dan tantangan yang dihadapi auditor saat mengaudit nilai wajar. Namun, mereka mengakui bahwa hasil penelitian tersebut belum tentu mencerminkan praktik dan tantangan yang dihadapi auditor di KAP yang lebih kecil. Penelitian ini bermaksud memperluas penelitian Glover dkk. (2017) dalam konteks yang berbeda, yaitu KAP di Indonesia, tanpa dibatasi oleh ukurannya.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi (1) penggunaan berbagai pendekatan substantif, (2) penggunaan pakar, dan (3) tantangan yang dihadapi auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Indonesia saat mengaudit nilai wajar.

## 2. Landasan Teori

Penelitian ini menerapkan teori institusional untuk memahami alasan auditor memilih suatu

pendekatan substantif daripada pendekatan lainnya. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menjelaskan penggunaan *appraiser*.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara dalam mengumpulkan data. Kriteria responden dalam penelitian ini ialah auditor eksternal yang berpengalaman mengaudit nilai wajar.

Proses seleksi untuk individu dilakukan dengan sampling nonprobabilitas, yaitu *convenience sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah KAP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota (DKI), Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

### 4. Hasil dan Diskusi

#### a. Responden

Tabel 1 berikut ini mendeskripsikan profil responden penelitian. Sesuai dengan informasi

yang disajikan pada Tabel 1 di bawah, dari 191 kuesioner yang dikirimkan, 83 respons (43,46%) berhasil diterima kembali. Responden memiliki rata-rata 4,23 tahun pengalaman sebagai auditor. Berdasarkan yang mengisi jabatan/posisinya, mayoritas responden ialah auditor junior dan senior (masing-masing sebesar 25,61%). Sebanyak 18,07% responden menyatakan bahwa mereka memiliki spesialisasi tertentu dalam nilai wajar dengan penurunan nilai, sekuritas investasi, *goodwill*, dan instrumen keuangan lain menjadi spesialisasi yang paling umum. Responden berasal dari lima provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan responden paling banyak berasal dari DKI Jakarta (37,93%).

Tabel 1. Demografi responden

Jumlah total responden	83
Rata-rata lama pengalaman audit (dalam tahun)	4,23
Posisi/jabatan (dalam persentase)	
Junior	25,61%
Senior	25,61%
Manajer	1,22%
Partner	2,44%
Tidak mengisi	44,58%
Spesialisasi nilai wajar (dalam persentase)	
Ya	18,07%
Tidak	72,29%
Tidak mengisi	9,64%
Jika “ya”, area spesialisasi (dalam persentase)	
Sekuritas investasi	33,33%
<i>Goodwill</i>	20%
Penurunan nilai	66,67%
Instrumen keuangan lain	20%
Valuasi bisnis	6,67%
Lainnya	6,67%
Provinsi asal KAP responden	
DKI Jakarta	11 (37,93%)
Bandung, Jawa Barat	4 (13,79%)
Semarang, Jawa Tengah	3 (10,34%)
Provinsi DIY	2 (6,90%)

Surabaya, Jawa Timur	8 (27,59%)
Tidak mengisi	1 (3,45%)

b. *Praktik Pengauditan Nilai Wajar (Penggunaan Pendekatan Uji Substantif)*

Bagian pertama kuesioner bertujuan untuk memahami lebih baik penggunaan tiga pendekatan uji substantif oleh auditor saat mengaudit nilai wajar seperti yang tercantum dalam Standar Audit 540, yaitu 1) meninjau peristiwa kemudian (*subsequent events*), 2)

menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen, dan 3) mengembangkan estimasi yang dibuat sendiri (*independen*). Bagian pertama kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yaitu instrumen keuangan dan aset nonkeuangan (misalnya *goodwill*, kombinasi bisnis, atau operasi yang dihentikan).

Tabel 1. Praktik pengauditan nilai wajar (pendekatan uji substantif) (n=83)

Pertanyaan	1-2 Jarang	3 Kadang	4-5 Sering	N/A
1. Dalam mengaudit instrumen keuangan, seberapa sering tim audit me-review peristiwa kemudian ( <i>subsequent events</i> )?	1,22%	10,84%	87,95%	0,00%
2. Dalam mengaudit instrumen keuangan, seberapa sering tim audit menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen?	1,20%	9,64%	87,95%	1,20%
3. Dalam mengaudit instrumen keuangan, seberapa sering tim audit mengembangkan estimasi yang dibuat sendiri ( <i>independen</i> )?	3,61%	18,07%	78,31%	0,00%
4. Dalam mengaudit instrumen keuangan, seberapa sering tim audit menggunakan kombinasi dari tiga langkah yang disebutkan di atas?	0,00%	9,64%	89,16%	1,20%
5. Dalam mengaudit aset nonkeuangan, seberapa sering tim audit me-review peristiwa dan transaksi kemudian ( <i>subsequent events</i> )?	0,00%	15,00%	85,00%	0,00%
6. Dalam mengaudit aset nonkeuangan, seberapa sering tim audit menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen?	0,00%	10,26%	89,74%	0,00%
7. Dalam mengaudit aset nonkeuangan, seberapa sering tim audit mengembangkan estimasi yang dibuat sendiri ( <i>independen</i> )?	2,56%	12,82%	84,62%	0,00%
8. Dalam mengaudit aset nonkeuangan, seberapa sering tim audit menggunakan kombinasi dari tiga langkah yang disebutkan di atas?	0,00%	31,58%	50,00%	0,00%
9. Saat mengembangkan estimasi independen, seberapa sering tim audit menggunakan asumsi yang dibuat oleh manajemen?	12,05%	12,05%	54,22%	21,69%

10. Saat mengembangkan estimasi independen, seberapa sering tim audit menggunakan asumsi tim audit sendiri?	00,00%	13,25%	66,27%	20,48%
---	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan Tabel 2, pendekatan yang menjadi preferensi utama auditor saat mengaudit instrumen keuangan ialah menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen (87,95%), dan *me-review* peristiwa kemudian (87,95%). Pendekatan yang menjadi preferensi terakhir auditor ialah mengembangkan estimasi yang dibuat sendiri atau estimasi independen (78,31%). Selanjutnya, untuk aset nonkeuangan, pendekatan yang menjadi preferensi pertama auditor ialah menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen (89,74%), sedangkan pendekatan yang menjadi preferensi terakhir auditor ialah mengembangkan estimasi yang dibuat sendiri atau estimasi independen (84,62%). Hal ini sejalan dengan temuan Glover dkk. (2017) yang melaporkan bahwa auditor biasanya memulai dengan menguji asumsi yang dibuat manajemen dan hanya dalam situasi berisiko tinggi dan kompleks pendekatan lainnya digunakan.

Berdasarkan Standar Audit 540 paragraf 13 (d) (i), auditor diperbolehkan untuk mengembangkan estimasi independen menggunakan model yang dikembangkan sendiri oleh auditor. Model tersebut bisa menggunakan asumsi yang dibuat manajemen ataupun auditor. Apabila auditor memilih untuk menggunakan asumsi yang dibuat manajemen, auditor harus menguji asumsi manajemen, model valuasi, dan data yang mendasari, sama seperti yang harus mereka lakukan saat menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen. Glover dkk. (2017)

mempertanyakan sejauh mana estimasi yang dibuat auditor dapat disebut independen apabila auditor menggunakan asumsi manajemen dan bukan asumsi auditor itu sendiri. Tabel 2, pertanyaan nomor sembilan menunjukkan bahwa sebesar 69,24% responden sering menggunakan asumsi yang dibuat manajemen saat mengembangkan asumsi independen, sedangkan 83,33% responden sering menggunakan asumsi yang dibuat tim audit sendiri (Tabel 2, pertanyaan nomor sepuluh). Hasil ini sejalan dengan temuan Glover dkk. (2017), yang menemukan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi auditor dalam memutuskan apakah akan menggunakan asumsi manajemen atau asumsi tim audit saat mengembangkan estimasi independen ialah 1) ketersediaan data independen, 2) keterandalan estimasi manajemen, dan 3) ketersediaan data yang dapat diverifikasi. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Responden 2 memberikan pernyataan berikut.

*“Kalau kita lihat dari SPI-nya (Sistem Pengendalian Intern. Jadi di SPI itu kira-kira mereka sudah bisa menjalankan nggak dari pos-pos akuntansinya. Kalau memang kurang, kita lihat dari asumsi kita, dari independensi kita.”*

### c. Penggunaan Tenaga Penilai (Appraiser)

Terkait dengan penggunaan tenaga penilai (*appraiser*) dalam pengauditan nilai wajar, Tabel 3 menyajikan jawaban responden. Sesuai informasi pada Tabel 3, pertanyaan

nomor satu dan dua menunjukkan bahwa auditor pada umumnya menggunakan tenaga penilai, internal ataupun eksternal, saat mengaudit nilai wajar instrumen keuangan maupun nonkeuangan (27,71% untuk

instrumen keuangan dan 20,48% untuk aset nonkeuangan).

Tabel 3. Penggunaan tenaga penilai (*appraiser*) (n=83)

Pertanyaan	1-2 Jarang	3 Kadang	4-5 Sering	N/A
1. Seberapa sering tim audit menggunakan <i>appraiser</i> untuk menentukan nilai wajar Level 2 dan 3 instrumen keuangan?	3,61%	10,84%	27,71%	57,83%
2. Seberapa sering tim audit menggunakan <i>appraiser</i> untuk menentukan nilai wajar aset nonkeuangan?	7,23%	8,43%	20,48%	63,86%
3. Seberapa sering <i>appraiser</i> yang merupakan staf KAP digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit instrumen keuangan?	2,41%	10,84%	12,05%	74,07%
4. Seberapa sering <i>appraiser</i> pihak ketiga digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit instrumen keuangan?	3,61%	21,69%	30,12%	44,58%
5. Seberapa sering anggota tim perikatan yang bukan spesialis penilai, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit instrumen keuangan?	6,02%	26,51%	28,92%	38,55%
6. Seberapa sering tim audit menggunakan lebih dari satu <i>appraiser</i> untuk instrumen keuangan?	27,71%	25,30%	19,28%	27,71%
7. Seberapa sering <i>appraiser</i> yang merupakan staf KAP digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit aset nonkeuangan?	1,20%	7,23%	18,07%	73,49%
8. Seberapa sering <i>appraiser</i> pihak ketiga digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit aset nonkeuangan?	1,20%	10,84%	22,89%	65,06%
9. Seberapa sering anggota tim perikatan yang bukan spesialis penilai, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, digunakan untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit aset nonkeuangan?	4,82%	12,05%	21,69%	61,45%

10. Seberapa sering tim audit menggunakan lebih dari satu <i>appraiser</i> untuk aset nonkeuangan?	10,84%	22,89%	16,87%	49,40%
--	--------	--------	--------	--------

Untuk lebih jauh membedakan antara penggunaan tenaga penilai internal dan eksternal/pihak ketiga, hasil yang disajikan pada Tabel 3, pertanyaan nomor 3-5 dan 7-9 menunjukkan frekuensi penggunaan tenaga penilai internal, pihak ketiga, atau anggota tim audit untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit nilai wajar instrumen keuangan dan nonkeuangan. Dalam mengembangkan estimasi independen, mayoritas responden menggunakan tenaga penilai eksternal, baik untuk instrumen keuangan (30,12%) maupun nonkeuangan (22,89%). Hasil ini berbeda dari temuan Glover dkk. (2017) di mana mayoritas responden menggunakan tenaga penilai internal untuk mengembangkan estimasi independen, baik untuk instrumen keuangan maupun nonkeuangan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kondisi yang berbeda di Indonesia. Seorang responden menyatakan demikian.

*“Di sini belum ada (tenaga penilai internal) karena kalau appraiser itu biasanya mereka memilih di luar, maksudnya nggak gabung KAP. Jadi (mereka bekerja di kantor) khusus appraiser gitu.”*

Hasil di atas juga didukung oleh temuan Griffith (2016) yang menyatakan bahwa keahlian valuasi sering tersedia secara internal untuk KAP skala besar (misalnya *Big Four*), sementara KAP *non-Big Four*, termasuk KAP di negara berkembang (seperti di Indonesia),

cenderung melibatkan tenaga penilai eksternal. Selain itu, perbedaan hasil juga dapat dijelaskan oleh perbedaan asal KAP responden, di mana mayoritas responden Glover, Taylor, dan Wu (2017) berasal dari KAP *Big Four* di Amerika Serikat, sedangkan responden penelitian ini mayoritas berasal dari KAP *non-Big Four* di Indonesia.

Bergantung pada input, asumsi, metode, dan model yang digunakan, estimasi antara satu *appraiser* dan yang lain dapat berbeda. Tabel 3, pertanyaan nomor enam dan sepuluh menunjukkan seberapa sering lebih dari satu *appraiser* digunakan untuk instrumen keuangan dan nonkeuangan. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan lebih dari satu *appraiser*, baik untuk instrumen keuangan (19,28%) maupun nonkeuangan (16,87%). Hasil ini sejalan dengan temuan Glover dkk. (2017).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor yang menjadi bahan pertimbangan auditor dalam menentukan apakah akan menggunakan tenaga penilai internal atau eksternal ialah sumber daya kantor akuntan publik. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini ialah kos/benefit dan keahlian. Seorang responden memberikan pernyataan berikut.

*“Untuk pertimbangan penggunaan tenaga ahli lain itu, segi kontrak juga bisa. Kontrak kerja, karena kan fee itu menentukan. Kita butuh tahu nilai wajar aset tersebut. Ketika feenya kecil, sedangkan nilai appraiser bisa dua kali lipatnya, kita tidak bisa*

*dong. Itu kan bisa jadi suatu pertimbangan kita. Selama kita bisa meyakini nilai perolehannya, kita belum tentu perlu menggunakan appraiser. Namun kalau kita tidak bisa meyakini nilai perolehannya dan kita butuh tahu nilai wajar aset, ya kita perlu appraiser juga. Sisi lain ya, kalau sesuai dengan nilai kontrak juga. Nggak semua auditor pakai appraiser.”*

Temuan di atas sejalan dengan hasil wawancara Glover dkk. (2017) yang menemukan bahwa tiga faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan auditor dalam menentukan tipe tenaga penilai yang digunakan (internal/eksternal) ialah 1) sumber daya perusahaan dalam hal kos/benefit, 2) sifat sekuritas yang diaudit, dan 3) kebijakan perusahaan tentang keharusan penggunaan tenaga penilai internal.

*d. Penggunaan Penyedia Jasa Penentuan Harga (Pricing)*

Bagian ketiga kuesioner terdiri atas lima pertanyaan tentang penggunaan penyedia jasa penentuan harga (*pricing*). Menurut Glover dkk. (2017), penyedia jasa penentuan harga umumnya memberikan informasi harga dan data terkait untuk instrumen keuangan. Estimasi nilai wajar yang disediakan biasanya tidak disesuaikan (*uncustomized*). Sebaliknya, tenaga penilai (*appraiser*) biasanya dilibatkan untuk memberikan estimasi yang disesuaikan (*customized*) untuk instrumen keuangan dan nonkeuangan. Pertanyaan pertama pada Tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 30,12% responden setuju bahwa sebelum krisis ekonomi pada tahun 2008, ketergantungan manajemen dan auditor pada penyedia jasa penentuan harga biasanya dianggap sebagai area audit yang relatif berisiko rendah.

Tabel 4. Penggunaan penyedia jasa *pricing* (n=83)

Pertanyaan	STS-TS Tidak Setuju	Netral	S-SS Setuju	N/A
1. Sebelum krisis ekonomi tahun 2008, penggunaan jasa <i>pricing</i> pihak ketiga oleh manajemen dan auditor biasanya dianggap area audit yang relatif berisiko rendah.	1,20%	26,51%	30,12%	42,17%
2. Setelah krisis ekonomi tahun 2008, penggunaan jasa <i>pricing</i> pihak ketiga oleh manajemen dan/atau auditor sekarang ini dianggap area audit yang relatif berisiko lebih tinggi.	0,00%	21,69%	34,94%	43,37%
	<b>1-2 Jarang</b>	<b>3 Kadang</b>	<b>4-5 Sering</b>	<b>N/A</b>
3. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, seberapa sering tim audit memperoleh harga sekuritas dari jasa <i>pricing</i> yang berbeda dari yang digunakan oleh manajemen?	7,23%	22,89%	22,89%	46,99%
4. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, seberapa sering tim audit tidak bisa memperoleh informasi eksklusif ( <i>proprietary</i> ) yang memadai dari jasa <i>pricing</i> pihak ketiga untuk mendukung model dan	16,87%	18,07%	19,28%	45,78%

asumsi yang digunakan manajemen dalam menentukan nilai wajar investasi?				
5. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, saat menggunakan jasa <i>pricing</i> untuk pekerjaan audit yang berkaitan dengan sekuritas investasi, seberapa sering tim audit memperoleh estimasi dari >1 penyedia jasa <i>pricing</i> ?	13,25%	21,69%	16,87%	48,19%

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 34,94% responden setuju bahwa karena krisis ekonomi pada tahun 2008, penggunaan penyedia jasa penentuan harga oleh manajemen dan auditor sekarang dianggap memiliki risiko audit yang relatif lebih tinggi (Tabel 4, pertanyaan nomor dua). Temuan ini didukung oleh Pannese dan DelFavero (2010) yang menyatakan bahwa krisis keuangan global tahun 2008 telah semakin menciptakan kerumitan bagi auditor sehubungan dengan tugas mereka yang harus menyatakan bahwa estimasi nilai wajar yang diaudit mencerminkan kenyataan ekonomi, terutama untuk aset dan liabilitas keuangan yang tidak memiliki pasar aktif. Chen dkk. (2019) menemukan bahwa risiko audit yang dirasakan meningkat selama periode krisis keuangan. Krisis keuangan menyingkapkan risiko sistemik yang tidak disadari auditor pada periode nonkrisis dan risiko tersebut jauh lebih rendah pada periode nonkrisis. Auditor merasakan risiko inheren dan kontrol yang lebih besar selama krisis keuangan.

Sebanyak 22,89% responden menggunakan penyedia jasa penentuan harga yang berbeda dari yang digunakan manajemen (Tabel 4, pertanyaan nomor tiga). Jumlah tersebut cukup besar mengingat sebanyak

46,99% tidak menjawab pertanyaan ini karena tidak pernah menggunakan penyedia jasa penentuan harga. Selanjutnya, sebesar 19,28% responden menyatakan sering tidak bisa memperoleh informasi memadai tentang model atau asumsi dari penyedia jasa penentuan harga pihak ketiga (Tabel 4, pertanyaan nomor empat). Jumlah ini juga cukup besar karena sebanyak 45,78% tidak menjawab pertanyaan. Karena penyedia jasa penentuan harga sering menggunakan berbagai pendekatan valuasi dan banyak auditor tidak bisa mendapatkan informasi terkait metode valuasi, Glover dkk. (2017) menduga bahwa auditor merasa perlu untuk mendapatkan estimasi dari lebih dari satu penyedia jasa penentuan harga. Dugaan ini didukung oleh 16,87% responden yang memperoleh estimasi dari lebih dari satu penyedia jasa penentuan harga (Tabel 4, pertanyaan nomor lima).

#### *e. Tantangan Pengauditan Nilai Wajar*

Bagian keempat kuesioner terdiri atas sembilan pertanyaan tentang tantangan pengauditan nilai wajar. Seperti ditunjukkan Tabel 5, pertanyaan nomor 1, sebanyak 50,60% responden menyatakan sering menghadapi situasi di mana manajemen memiliki pengetahuan dan keahlian tentang proses dan metodologi valuasi yang relatif dangkal.

Tabel 5. Tantangan pengauditan nilai wajar (n=83)

Pertanyaan	1-2 Jarang	3 Kadang	4-5 Sering	N/A
1. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, seberapa sering auditor menghadapi situasi di mana pengetahuan manajemen tentang proses dan metodologi valuasi relatif dangkal?	7,23%	39,76%	50,60%	2,41%
2. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, saat ada masalah dengan pengukuran nilai wajar yang dibuat oleh manajemen, seberapa sering masalah tersebut berhubungan dengan				
a. ketepatan asumsi manajemen (termasuk jika manajemen menggunakan <i>appraiser</i> )?	19,28%	20,48%	55,42%	4,82%
b. ketepatan model/metode manajemen?	19,28%	28,92%	45,78%	6,02%
c. alasan yang salah yang digunakan manajemen untuk sampai pada nilai wajar tersebut?	16,87%	31,33%	45,78%	6,02%
d. dokumentasi asumsi manajemen yang tidak cukup untuk membuktikan pemahaman mereka akan informasi yang diperoleh dari jasa <i>pricing</i> pihak ketiga?	15,66%	27,71%	22,89%	33,73 %
e. kesalahan data dasar yang digunakan oleh manajemen sebagai input?	14,46%	44,58%	32,53%	8,43%
f. kurangnya keahlian dan pengalaman pihak yang mengukur nilai wajar (baik manajemen ataupun <i>appraiser</i> )?	22,89%	38,55%	26,51%	12,05 %
g. pengungkapan catatan kaki yang tidak responsif terhadap sifat dan tingkat pengungkapan yang diperlukan?	25,30%	26,51%	39,76%	8,43%
h. kelemahan pengendalian internal lainnya terkait proses pengukuran nilai wajar yang tidak disebutkan di atas?	10,84%	37,35%	43,37%	8,43%

Selanjutnya, Tabel 4 juga menunjukkan bahwa responden melaporkan tiga tantangan/masalah yang paling sering dihadapi saat mengaudit nilai wajar (Tabel 5, pertanyaan 2a-2h): 1) ketepatan asumsi manajemen (55,42%), 2) ketepatan model/metode manajemen (45,78%), dan 3) ketepatan alasan yang digunakan manajemen untuk sampai pada nilai wajar tersebut (45,78%).

Pengetahuan dan keahlian manajemen tentang proses dan metodologi valuasi yang cenderung dangkal akan menciptakan tantangan tambahan bagi tim audit.

Berdasarkan hasil wawancara, respons auditor saat menemui situasi di atas ialah melakukan prosedur audit tambahan. Seorang responden memberikan pernyataan berikut.

*“Kita coba cari tahu perolehan (aset)nya berapa. Jadi apabila itu sampai memang benar-benar nggak dapat kita baru konsulkan ke mereka (klien). Misalnya (aset) motor tahun berapa. Dia (klien) belum nyatet, kita coba cek nilai pasar dulu nih. Kita cek dulu untuk masukan ke mereka.”*

Hal ini sejalan dengan temuan Griffith dkk. (2017) yang menyatakan bahwa tiga respons utama auditor dalam situasi semacam itu ialah

1) auditor mengharapkan manajemen akan lebih mengandalkan tenaga penilai pihak ketiga, 2) mempertimbangkan dampak pada efektivitas pengendalian internal, dan 3) auditor lebih mengandalkan tenaga penilai dan melakukan prosedur tambahan.

#### *f. Perspektif Teori Institusional*

Estimasi akuntansi sulit untuk diaudit karena auditor harus menilai kewajaran estimasi dan bukan sekadar memverifikasi keakuratannya. Pada bagian keempat kuesioner, auditor menilai seberapa sering masalah tertentu dihadapi oleh tim audit saat mereka mengaudit nilai wajar. Menurut Griffith dkk. (2015), masalah ini bisa muncul karena dua penyebab: 1) kantor akuntan publik dan standar yang terlalu menekankan pada aspek verifikasi model manajemen daripada secara kritis mengevaluasi kewajaran estimasi nilai wajar, dan 2) kantor akuntan publik membagi antara pengetahuan audit dan valuasi sehingga auditor tidak dapat mengaudit nilai wajar secara efektif karena pengetahuan yang mereka miliki kurang memadai.

Berdasarkan hasil kuesioner, meskipun standar memperbolehkan beberapa pendekatan dalam uji substantif, pendekatan yang paling sering dipakai auditor ialah menguji asumsi yang dibuat oleh manajemen, sedangkan yang paling jarang dipakai ialah mengembangkan estimasi yang dibuat oleh tim audit sendiri.

Penyebab kedua yang diidentifikasi oleh Griffith dkk. (2015) ialah kantor akuntan publik telah menciptakan pembagian pengetahuan sedemikian rupa sehingga auditor bertanggung jawab untuk mengetahui cara mengaudit estimasi nilai wajar yang kompleks, tetapi melimpahkan

pengetahuan tentang cara menilai estimasi nilai wajar yang kompleks ke tenaga penilai (*appraiser*).

Teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan alasan auditor cenderung menggunakan pendekatan verifikasi daripada pendekatan lainnya. Meskipun nilai wajar makin banyak digunakan dalam laporan keuangan, standar audit terkait nilai wajar tidak banyak berubah dari segi substansi sejak pertama kali diadopsi penuh tahun 2004 di Indonesia. Kurangnya pedoman tentang bagaimana auditor harus mengatasi keadaan yang berubah meninggalkan kekosongan yang harus diisi. Dalam kasus seperti itu, teori institusional berpendapat bahwa perusahaan, dalam hal ini kantor akuntan publik, akan dibimbing oleh praktik yang telah disahkan meskipun praktik ini tidak optimal untuk tugas yang diberikan (Zucker 1987). Menguji bagaimana manajemen membuat estimasi nilai wajar mungkin dianggap sah karena pedoman yang tersedia untuk auditor di Standar Audit (SA) 540 sebagian besar berfokus pada pendekatan ini. Meskipun SA 540 memperbolehkan tiga pendekatan, standar ini berisi enam belas paragraf panduan tentang cara menguji proses manajemen dalam membuat estimasi nilai wajar dan hanya empat belas paragraf yang digabungkan untuk dua pendekatan lainnya. Dengan demikian, menguji proses manajemen cenderung dipandang sebagai pendekatan yang paling sah karena standar merinci apa yang harus dilakukan dengan lebih jelas.

Selanjutnya, teori institusional berpendapat bahwa salah satu cara organisasi melegitimasi prosedur untuk situasi baru

adalah dengan mengadaptasi prosedur yang sudah mereka gunakan di dalam situasi lain, bahkan jika prosedur ini bukan yang paling cocok untuk situasi baru tersebut (Zucker 1987). Griffith dkk. (2015) menemukan bahwa auditor mengadaptasi metode dan pendekatan yang digunakan untuk mengaudit akun tanpa ketidakpastian ke pengauditan nilai wajar. Akun tanpa ketidakpastian adalah akun yang umumnya mengikuti akuntansi kos historis dan diaudit dengan memverifikasi kos asli. Kantor akuntan publik mengadopsi pendekatan verifikasi ini ketika mengaudit estimasi nilai wajar meskipun verifikasi kurang sesuai untuk akun yang penilaiannya melibatkan ketidakpastian. Selain itu, kantor akuntan publik mengadaptasi metode yang sangat terstruktur dan rutin digunakan untuk memecah audit menjadi serangkaian langkah untuk mengaudit nilai wajar. Pendekatan seperti *checklist* ini mengakomodasi verifikasi komponen-komponen terpisah estimasi nilai wajar manajemen, tapi tidak mengakomodasi kompleksitas proses yang lebih terintegrasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan menciptakan ilusi bahwa langkah-langkah program audit tidak terkait. Dengan demikian, saling ketergantungan di antara langkah-langkah diabaikan sehingga hal itu mencegah evaluasi nilai wajar yang lebih holistik dan kritis. Legitimasi pendekatan verifikasi yang digunakan dalam mengaudit akun nonestimasi telah menjadikan pengauditan nilai wajar sebagai tugas verifikasi daripada tugas evaluasi kritis. Teori institusional juga menjelaskan kebiasaan yang muncul seputar pembagian pengetahuan

antara auditor dan tenaga penilai. Auditor menciptakan pemisahan pengetahuan sedemikian rupa sehingga mereka bertanggung jawab untuk memahami bagaimana memperoleh bukti tentang elemen nilai wajar terkait akuntansi dan mereka melimpahkan pengetahuan dan pengumpulan bukti tentang elemen nilai wajar terkait valuasi pada tenaga penilai. Daripada membangun keahlian valuasi auditor, kantor akuntan publik memilih mendukung dan mengandalkan keahlian tenaga penilai. Hal ini berlaku baik untuk pengauditan nilai wajar instrumen keuangan maupun aset nonkeuangan. Sebanyak 30,12% responden menyatakan sering menggunakan tenaga penilai pihak ketiga (eksternal) untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit instrumen keuangan. Sementara itu, sebanyak 28,92% responden yang menyatakan sering menggunakan auditor untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit instrumen keuangan. Selanjutnya, sebanyak 22,89% responden menyatakan sering menggunakan tenaga penilai pihak ketiga (eksternal) saat mengaudit aset nonkeuangan. Sebanyak 21,69% responden menyatakan sering menggunakan auditor untuk mengembangkan estimasi independen saat mengaudit aset nonkeuangan. Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa kantor akuntan publik tempat responden bekerja mengikuti kebiasaan pembagian pengetahuan antara auditor dan tenaga penilai. Hal ini menjadi bukti dari isomorfisme mimetik. Kantor akuntan publik telah membuat nilai wajar kompleks menjadi bisa diaudit dengan mengandalkan orang lain

(tenaga penilai) yang memiliki pengetahuan yang diperlukan.

### **5. Simpulan dan Keterbatasan**

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang menjadi preferensi utama auditor dalam mengaudit nilai wajar, baik untuk instrumen keuangan maupun aset nonkeuangan, ialah menguji asumsi yang dibuat manajemen. Sementara itu, pengembangan estimasi independen menjadi preferensi terakhir auditor, baik untuk instrumen keuangan maupun aset nonkeuangan. Sehubungan dengan pertanyaan penelitian kedua, penelitian ini memperoleh beberapa hasil. Pertama, auditor pada umumnya menggunakan tenaga penilai, baik internal ataupun eksternal, saat mengaudit nilai wajar instrumen keuangan maupun nonkeuangan. Kedua, dalam mengembangkan estimasi independen, mayoritas responden menggunakan tenaga penilai eksternal, baik untuk instrumen keuangan maupun nonkeuangan. Ketiga, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan lebih dari satu *appraiser*, baik untuk instrumen keuangan maupun nonkeuangan. Sehubungan dengan pertanyaan penelitian ketiga, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka sering berhadapan dengan situasi di mana pengetahuan dan keahlian manajemen mengenai proses dan metodologi valuasi kurang memadai. Tiga tantangan yang paling banyak ditemui auditor saat mengaudit nilai wajar ialah ketepatan asumsi manajemen, ketepatan model/metode manajemen, dan ketepatan alasan yang

digunakan manajemen untuk sampai pada nilai wajar tersebut.

Keterbatasan penelitian ini salah satunya ialah pengambilan data dilakukan pada Oktober 2019-Februari 2020 yang merupakan musim puncak bagi responden (auditor). Karena kesibukan dan keterbatasan waktu, hanya ada dua auditor senior yang bersedia diwawancara. Keterbatasan selanjutnya ialah mayoritas responden merupakan auditor junior dan senior yang hanya punya akses terbatas atau sebagian terhadap keseluruhan tahapan pengauditan estimasi nilai wajar.

Temuan dalam studi ini memberikan sejumlah area yang potensial untuk penelitian di masa depan, yaitu menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor utama yang mendorong auditor dalam memilih pendekatan pengujian substantif saat mengaudit nilai wajar, menyelidiki apakah pendekatan uji substantif berbeda antara instrumen keuangan dan nonkeuangan, serta berfokus pada pengembangan metodologi audit baru yang lebih tidak bergantung pada pendekatan verifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang layak untuk praktik saat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Bucaro, A. (2019). Enhancing Auditors' Critical Thinking in Audits of Complex Estimates. *Accounting, Organizations And Society*, 73, 35-49.
- Cannon, N., & Bedard, J. (2017). Auditing Challenging Fair Value Measurements: Evidence from the Field. *The Accounting Review*, 92(4), 81-114.
- Chen, H., Hua, S., Liu, Z., & Zhang, M. (2019). Audit Fees, Perceived Audit Risk, and the Financial Crisis of 2008. *Asian Review Of Accounting*, 27(1), 97-111.
- Christensen, B., Glover, S., & Wood, D. (2012). Extreme Estimation Uncertainty in Fair Value Estimates: Implications for Audit Assurance.

- Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 31(1), 127-146.
- Glover, S., Taylor, M., & Wu, Y. (2017). Current Practices and Challenges in Auditing Fair Value Measurements and Complex Estimates: Implications for Auditing Standards and the Academy. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 36(1), 63-84.
- Griffith, E. E. (2016). Auditors, Specialists, and Professional Jurisdiction in Audits of Fair Values. *Working paper. University of Wisconsin - Madison*.
- Griffith, E., Hammersley, J., & Kadous, K. (2015). Audits of Complex Estimates as Verification of Management Numbers: How Institutional Pressures Shape Practice. *Contemporary Accounting Research*, 32(3), 833-863.
- Kang, Y., Trotman, A., & Trotman, K. (2015). The Effect of an Audit Judgment Rule on Audit Committee Members' Professional Skepticism: The Case of Accounting Estimates. *Accounting, Organizations And Society*, 46, 59-76.
- Martin, R., Rich, J., & Wilks, T. (2006). Auditing Fair Value Measurements: A Synthesis of Relevant Research. *Accounting Horizons*, 20(3), 287-303.
- Miles, M. & Huberman A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- Pannese, D., & DelFavero, A. (2010). Fair Value Accounting: Affect On The Auditing Profession. *Journal Of Applied Business Research (JABR)*, 26(3).
- Zucker, L. G. (1987). Institutional Theories of Organizations. *Annual Review of Sociology*, 13, 443-64.